



Media: Joglo Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 14 Juli 2026

Halaman: 3

Dampak Penataan Malioboro

Dewan Ingatkan Potensi Koreksi PAD

YOGYAKARTA, *Joglo Jogja* – Penataan kawasan Malioboro yang semakin intensif, khususnya pasca-penutupan Tempat Khusus Parkir (TKP) Senopati sejak Maret lalu, menarik alarm di gedung dewan, DPRD Kota Yogyakarta mewanti-wanti Pemkot agar kebijakan tersebut tidak menjadi bumerang bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2027 mendatang.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Yogyakarta, Krisnadi Setyawan, menjadi pihak yang paling vokal menyuarakan keresahan ini. Ia menilai, rencana pemberlakuan kawasan pedestrian penuh di Malioboro tanpa solusi parkir dan transportasi yang mumpuni adalah ancaman nyata bagi sektor pariwisata.

"Kita harus akali keberlangsungan PAD. Kalau aksesibilitas wisatawan terganggu, dampaknya langsung ke kunjungan. Jangan sampai penataan ini justru mematikan daya tarik Malioboro dan akhirnya menggusur pundi-pundi pendapatan daerah," tegasnya.

Krisnadi menyoroti, meski saat ini sudah ada pengalihan bus wisata, solusi yang ditawarkan dinilai belum komprehensif. Jika tidak diantisipasi sejak dini dalam struktur APBD 2027, ia khawatir sektor pariwisata yang selama ini jadi tulang punggung ekonomi Yogyakarta bakal terdampak serius.

"Penyusunan KUA-PPAS 2027 harus punya ruang untuk langkah antisipatif.

Badan Anggaran bersama TAPD harus duduk bareng merumuskan strategi jitu agar kebijakan penataan tidak kontraproduktif terhadap target pendapatan," imbuhnya.

Di sisi lain, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan dalam sambutannya menekankan bahwa KUA-PPAS 2027 mengusung tema "Akselerasi Pembangunan Prioritas untuk Kesejahteraan Masyarakat". Wawan menegaskan komitmen Pemkot untuk menerapkan pola Money Follow Program dan Program Follow Result.

"Setiap rupiah harus punya dampak terukur. Kami ingin anggaran ini benar-benar tepat sasaran untuk menjawab tantangan pembangunan, termasuk kesinambungan program prioritas daerah," ujar Wawan.

Terkait sorotan dewan, pimpinan rapat memutuskan agar persolan dampak penataan Malioboro menjadi salah satu poin krusial yang akan dibahas lebih dalam di tingkat komisi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Harapannya, pembahasan di tingkat komisi nanti bisa melahirkan kebijakan anggaran yang tak hanya memuluskan proyek pembangunan, tapi juga memberikan kepastian bagi pelaku usaha, pekerja wisata, hingga masyarakat yang bergantung hidup dari denyut nadi Malioboro.

"Kami berkomitmen memastikan APBD 2027 transparan dan responsif. Isu Malioboro ini akan kami jadikan salah satu fokus pembahasan agar kebijakan anggaran mampu menjawab realitas di lapangan," pungkasnya. (eri/bid/wa)



NYAMAN: Sejumlah wisatawan bersantai di kawasan Sisi Malioboro, Kompleks Stasiun Yogyakarta saat malam hari, belum lama ini.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005